

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS  
DI KABUPATEN BOJONEGORO  
(Studi Kasus di Dinas Kesehatan)**

Rupiarsieh

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : [arsieh\\_sakti@yahoo.com](mailto:arsieh_sakti@yahoo.com)

**Abstract**

*The Bojonegoro Regency Government has a policy that regulates HIV/AIDS prevention, namely the Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning HIV/AIDS and Tuberculosis Control in Bojonegoro Regency. The purpose of this study was to evaluate the HIV/AIDS prevention policy in Bojonegoro Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This study focuses on the evaluation of HIV/AIDS control policies in Bojonegoro Regency using the six evaluation criteria proposed by William N. Duun, namely the criteria for effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that the effectiveness criteria in the evaluation of HIV/AIDS prevention policies have not been achieved. Effectiveness requires an effort to achieve it. In the AIDS control policy, there are efforts to overcome, namely through promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts. On the criteria of adequacy, the HIV/AIDS response policy is considered sufficient in satisfying the needs, values, or opportunities that create problems. In the regulation there are obligations of the target community of policies that must be carried out. With this obligation, it is easier to find people with HIV/AIDS (PLWHA) early. In the evaluation of this mitigation policy, the smoothing criteria have not been met. Puskesmas in every sub-district in Bojonegoro Regency cannot be used as a reference for HIV/AIDS treatment.*

*Keywords: evaluation, policy, HIV/AIDS prevention*

**Abstrak**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kebijakan yang mengatur tentang penanggulangan HIV/AIDS, yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberculosis di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan enam kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Duun yaitu kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil menunjukkan bahwa Kriteria efektifitas pada evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS belum tercapai. Keefektivitasan diperlukan suatu usaha untuk mencapainya. Dalam kebijakan penanggulangan AIDS terdapat upaya-upaya penanggulangan yaitu melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada kriteria kecukupan, kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dinilai cukup dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam peraturan tersebut terdapat kewajiban masyarakat sasaran kebijakan yang harus dilakukan. Dengan adanya kewajiban tersebut penemuan dini Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) lebih mudah untuk didapatkan. Dalam evaluasi kebijakan penanggulangan ini, kriteria perataan belum terpenuhi. Puskesmas disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro belum bisa dijadikan rujukan pengobatan HIV/AIDS.

Kata kunci : evaluasi, kebijakan, penanggulangan HIV/AIDS

## PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyebab penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dengan cara menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Fenomena “gunung es” dalam kasus HIV/AIDS di Indonesia menjadi diskursus yang perlu mendapat perhatian, karena jumlah orang yang dilaporkan menderita penyakit ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang sebenarnya (Atikah Lenny, 2015).

Penularan virus HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membrane mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vagina, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.

HIV dapat mempengaruhi hampir semua organ tubuh, seseorang yang terinfeksi HIV akan mempunyai resiko lebih besar menderita penyakit kanker, hal tersebut dikarenakan infeksi oleh virus DNA penyebab mutasi genetik. Selain kanker, juga dapat terkena tumor (Buna Sudikno, 2011). Selain berdampak negatif pada kesehatan, HIV/AIDS juga berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian.

Jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, Jawa Timur menempati urutan kedua kasus HIV/AIDS. Per September 2016 penderita HIV/AIDS meningkat. Kasus HIV 36.881 dan kasus AIDS sebanyak 17.394. Jika dilihat lebih rinci, kematian pada kasus HIV/AIDS tercatat ada 3.729 orang. Sementara total kasus AIDS pada anak sebanyak 615 orang dan kasus AIDS pada ibu rumah tangga 2.944 orang.

Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi. Kasus HIV dan AIDS yang ditemukan di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2002 sampai Desember 2019 tercatat 1408 kasus dengan penderita meninggal sebanyak 248 orang, dengan jumlah penderita yang masih hidup sebanyak 1160 orang. Jika dilihat dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV dan AIDS menunjukkan peningkatan secara signifikan bahkan permasalahannya sangat kompleks.

Pada tahun 2019 jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 158 kasus, yaitu 85 kasus berjenis kelamin laki-laki, dan 73 kasus berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil dari validasi jumlah penderita HIV/AIDS yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dapat diketahui bahwa dari 28 kecamatan yang ada di Bojonegoro hanya ada 3 kecamatan yang belum diketemukan pengidap HIV/AIDS, yaitu di Kecamatan Kasiman, Kecamatan Ngambon, dan Kecamatan Sekar. Kecamatan dengan tingkat kasus HIV/AIDS tinggi yaitu, Kecamatan Bojonegoro dengan jumlah 18 kasus, Kecamatan Kedungadem sebanyak 15 kasus, dan Kecamatan Kepohbaru sebanyak 12 kasus.

Permasalahan mengenai penyakit HIV/AIDS yang semakin kompleks, sebagai upaya dalam menekan jumlah kasus penderita HIV/AIDS yang semakin bertambah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro.

Upaya penyadaran tentang penyakit HIV/AIDS terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen dalam pencegahan, sosialisasi dan penanganan pasien HIV/AIDS. Namun, jumlah kasus penderita

HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro di setiap tahunnya masih saja bertambah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro disebutkan bahwa masyarakat berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS, dengan cara: meningkatkan pendidikan keimanan dan ketaqwaan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS; berperilaku hidup bersih dan sehat; melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang diduga menderita HIV/AIDS; bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku; dan tidak melakukan stigma terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Namun, kenyataannya kesadaran masyarakat untuk sadar akan hidup sehat masih rendah. Selain kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat masyarakat yang masih rendah, dalam laporan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 menyebutkan stigma dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV/AIDS yang tinggi dimasyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Adapun penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan enam kriteria yakni 1) Efektifitas, 2) Efisiensi, 3)Kecukupan, 4) Perataan, 5)Rspnsivitas, 6) Ketepatan. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 66 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara kuesioner (angket), wawancara mendalam dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas**

Kriteria efektivitas dalam evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS merujuk pada pencapaian hasil. Dapat dikatakan berhasil ketika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan laju penularan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas kehidupan ODHA, dan untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS. Peraturan tersebut menyebutkan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dibantu oleh kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya. Jika eksistensi kelompok kerja belum maksimal, tentu saja akan berpengaruh pada pencapaian hasil.

Penemuan dini ODHA dimaksudkan agar orang yang berstatus positif HIV/AIDS dapat segera dilakukan pengobatan dan agar penularan HIV/AIDS tidak meluas . ODHA mempunyai masalah sosial yang tinggi, penolakan dan stigma dimasyarakat juga masih tinggi. Oleh karena itu diperlukan sebuah tempat atau wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi serta sebagai tempat untuk saling memotivasi. Melalui LSM yang bergerak dibidang HIV/AIDS, ODHA mendapatkan pendampingan dan dukungan. Apabila mitra LSM ini masih minim, tentunya belum bisa memberikan pendampingan dan dukungan secara maksima

### **2. Efisiensi**

Kriteria efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Pembiayaan atas kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif, terpadu dan berkesinambungan mengenai pencegahan penularan HIV/AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) ditemukan, kemudian dilakukan penanggulangan HIV/AIDS melalui upaya kuratif, yaitu dengan menyediakan obat Antiretroviral (ARV) di tempat pelayanan kesehatan. Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan terhadap setiap pola tranmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama Wanita Pekerja Seks dan Pengguna Napza Suntik. Rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna Napza suntik dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap, dan program pasca rawat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Upaya rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan mengadakan workshop ODHA Berdaya dengan tujuan memberikan dukungan kepada ODHA untuk bisa menerima kondisinya, memberikan motivasi untuk tetap produktif dan mengembalikan kualitas hidupnya.

### **3. Kecukupan**

Kriteria kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan maupun kesempatan yang menyebabkan timbulnya suatu masalah. Semakin banyak kegiatan penanggulangan melalui upaya promotif dan preventif yang

dilakukan, maka semakin banyak pula masyarakat yang paham dan mau untuk melakukan tes HIV, baik Voluntary Counseling and Tasting (VCT) maupun Provider Initiative Test and Counseling (PITC). Dari tes HIV tersebut ditemukan kasus baru. Setelah penemuan kasus baru tersebut kemudian dilakukan upaya pengobatan, dengan tujuan untuk mengurangi resiko penularan HIV/AIDS.

### **4. Perataan**

Kriteria perataan berkenaan dengan keadilan yang sama diberikan kepada sasaran kebijakan, akibat atau usaha dari kebijakan tersebut harus didistribusikan secara adil. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro menyebutkan sasaran dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS mencakup seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Bojonegoro.

Terdapat 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro hanya ada 3 kecamatan yang belum ditemukan pengidap HIV/AIDS, yang artinya penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro ini sudah meluas. Hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro terdapat Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dan 2 puskesmas yang dapat dijadikan rujukan pengobatan HIV/AIDS, yaitu Puskesmas Kalitidu dan Puskesmas Baureno. Hal tersebut menyebabkan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berdomisili jauh dari fasilitas kesehatan tersebut sulit untuk menjangkau.

### **5. Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan masyarakat. , penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro dinilai cukup. Namun, beberapa responden yang berstatus positif HIV/AIDS menilai

bahwa penanggulangan HIV/AIDS kurang maksimal. Untuk itu Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) memberikan beberapa saran, antara lain: perbanyak melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan dukungan terhadap ODHA, penambahan anggaran untuk kegiatan pendampingan ODHA, pengadaan bantuan susu, vitamin, serta biaya sekolah untuk anak-anak dengan HIV, penambahan alat tes viral load, melibatkan Kelompok Dukungan Sebaya dalam kegiatan penanggulangan, dan menyediakan ARV disetiap Puskesmas. Saran-saran tersebut dimaksudkan agar kedepannya penanggulangan HIV/AIDS lebih baik dari sebelumnya.

#### 6. Ketepatan

Kriteria ketepatan berkenaan dengan apakah tujuan kebijakan tersebut benar-benar berguna dan bernilai. Pada evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS merujuk pada nilai guna dari upaya yang sudah dilakukan.

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) merasakan dampak dari adanya kebijakan penanggulangan HIV/AIDS melalui upaya kuratif atau pengobatan. ODHA mendapatkan layanan tes dan pengobatan HIV secara gratis, mendapatkan sosialisasi dan pertemuan sesama ODHA untuk saling memotivasi dan meningkatkan kualitas hidupnya.

#### SIMPULAN

Dalam penelitian evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang meliputi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria efektifitas pada evaluasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS belum tercapai. Tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai, hal ini disebabkan karena kerja sama dari lintas sektor termasuk masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS belum maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Paja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Arikunto, S. Jabar, C. *Evaluasi Program Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Dwi, C.Sri, dkk, *Manajemen Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS dalam Upaya Screening di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Manajerial Bisnis, Vol. 2 No. 3, April-Juli 2019

Lenny, Atikah, dkk, *Pengetahuan, Sikap dan Pencegahan HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga*, KEMAS, Vol. 11 No. 1, 2015.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro, 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro, 2017

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Salemba Humaika, Jakarta, 2012. Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Siti, Widodo, dkk, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency/Aquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kota Surakarta*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V No. 2, Juli-Desember 2017.

Sudikno, Bona, dkk, *Pengetahuan HIV dan AIDS pada Remaja di Indonesia*, Jurnal

Kesehatan Reproduksi, Vol. 1 No. 3, Agustus 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. William N. Duun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.